



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : bkdprov@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 1911/-083.1

12 Februari 2019

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Yth. 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah

2. Rektor Perguruan Tinggi

di

tempat

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini saya sampaikan Pengumuman Sekretaris Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir. Peserta Seleksi Terbuka dapat berasal dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi lain untuk 3 (tiga) jabatan sebagai berikut :

1. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
2. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
3. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi/unit kerja Bapak/Ibu. Informasi selengkapnya tentang ketentuan, persyaratan, tahapan, dan mekanisme pendaftaran seleksi terbuka dapat diakses melalui website: <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chardir, M.Si.

NIP. 196608181990031008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

Nomor 4 TAHUN 2019

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bersama ini diberikan kesempatan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti Seleksi Terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Seleksi Terbuka ini merupakan seleksi untuk menetapkan calon pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
2. Peserta seleksi terbuka berasal dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia untuk menetapkan calon pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.b) sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN
1.	Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata
2.	Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
3.	Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi

3. Deskripsi masing-masing jabatan dapat dilihat dalam website : <https://seleksiterbuka.jakarta.go.id>.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki jenjang pangkat serendah-rendahnya satu tingkat di bawah persyaratan pangkat dalam jabatan;
3. Berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada 1 April 2019 (lahir setelah bulan Maret 1961);
4. Sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali untuk Pejabat Fungsional (yang terkait bidang tugasnya) jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
5. Memiliki latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang terkait dengan jabatan yang dilamar; ✓
6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan rumpun jabatan yang akan diduduki paling singkat selama 7 (tujuh) tahun secara kumulatif;
7. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terakhir, kecuali untuk pejabat fungsional menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);